



KPK Lirik Potensi Sanggau

Calon Percontohan Antikorupsi

SANGGAU, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan observasi calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Kabupaten Sanggau. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sanggau, Rabu (6/3).

"Jadi saya cerita sedikit ya, jadi pada tahun 2021 sampai tahun 2023 kami fokusnya di desa antikorupsi. Tapi kemudian di tahun 2023 ini kami diminta untuk perluasan, sehingga kita melakukan percontohan untuk kabupaten dan kota antikorupsi," kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Herlina Jeane Aldian usai menghadiri observasi calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di aula Kantor Bupati Sanggau, Rabu (6/3).

"Di tahun 2023 ini kita sudah menyelesaikan indikator-indikatornya. Nah di tahun 2024 ini kita diminta untuk membuat pilot project empat kabupaten dan kota antikorupsi. Nah, makanya kita akhirnya datang ke empat provinsi dulu ni, kita observasi ada total delapan kabupaten dan empat kota untuk akhirnya kita seleksi lagi berdasarkan indikator-indikator mana yang kira-kira bisa untuk menjadi pilot project dulu di tahun ini sebagai kabupaten dan kota antikorupsi," tambahnya.

Delapan kabupaten dan empat kota yang dimaksud berada Sumatera Barat dengan dua kabupaten dan satu kota. Kemudian di Kalbar juga dua kabupaten dan satu kota. Jawa Tengah dengan dua kabupaten dan satu kota, dan terakhir di Bali juga dengan dua kabupaten dan satu kota.

"Untuk di Kalbar, kemarin kita sudah di Sekadau, hari ini di Kabupaten Sanggau dan besok kita ada di Kota Pontianak. Jadi nanti di Kalbar ini, kita akan pilih satu saja sebagai percontohan. Entah itu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau atau Kota Pontianak," jelasnya.

Tujuan dari semuanya ini lanjut dia adalah sebagai upaya pemberantasan antikorupsi. Jadi dari indikator-indikator ini akan disambungkan dengan program-program pemerintahan daerah.

"Jadi kita akan lihat program-program mana saja yang bersentuhan langsung dengan upaya pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak akan mendorong adanya program atau sistem baru, tapi kita akan lihat sistem-sistem yang dilaksanakan di pemerintahan ini apakah sudah sesuai dengan nilai-

nilai anti korupsi, kemudian upaya apa yang sudah dilakukan pemma untuk memberantas korupsi di daerahnya," tuturnya.


Sementara itu, Pj Bupati Sanggau, Suherman mengucapkan terima kasih kepada KPK RI yang mana Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang menjadi calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi.

"Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Herlina bahwa ada 8 kriteria penilaian terhadap calon percontohan Kabupaten dan Kota anti korupsi ini. Nah dalam 8 kriteria ini sepertinya Sanggau sudah memenuhi persyaratan, makanya dipilih menjadi salah satu kabupaten dan kota di Kalbar. Dari 3 yang di pilih salah satunya Kabupaten Sanggau," katanya.

Oleh karenanya, Suherman berharap Kabupaten Sanggau akan menjadi percontohan kabupaten/kota antikorupsi. Kepada perangkat daerah, regulasi sekarang sudah semakin ketat. Kemudian pemeriksaan juga sudah secara rutin dan berkala dilakukan.

"Saya berharap tidak ada kepala perangkat daerah itu yang mencoba bermain di luar aturan, terutama yang

berkaitan dengan tindakan korupsi. Dan ini tidak hanya kepala perangkat daerah, karena salah satu kunci tadi adalah salah satunya peran serta masyarakat. Nah kita juga mengharapkan kepada masyarakat untuk mengawasi pemerintah daerah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara yang artinya bersifat koruptif," tegasnya. **(hen)**



Saya berharap tidak ada kepala perangkat daerah itu yang mencoba bermain di luar aturan, terutama yang berkaitan dengan tindakan korupsi

Suherman
Pj Bupati Sanggau